

LEGIUN MANGKUNEGARAN TAHUN 1916 – 1942 DAN IMPLEMENTASINYA DALAM PEMBELAJARAN SEJARAH¹

Oleh

Anita Dhian Pratiwi²

Hermanu Joebagyo, Tri Yuniyanto³

Abstracs

The purpose of this research is to find out: (1) the history of Legiun Mangkunegaran, (2) changes and dynamics Legiun Mangkunegaran in 1916 – 1942, (3) the impact of Legiun Mangkunegaran for the stability of safety of Surakarta at 1916 – 1942, (4) the implementation of Legiun Mangkunegaran at 1916 – 1942 in learning history to the students of eleventh grade of senior high school.

The research method that is uses is historical method. The source of data that is used in this study is primary and secondary sources. Historical method was the critical process of examining and analyzing the past recording and heritage, and then reconstructing them based on the data obtained so that a historiography results. The procedure of historical method included heuristic, critical, interpretation, and historiography.

Based on the result of the research can be concluded that: (1) Legiun Mangkunegaran was formed at July 29, 1808 based on decree of Governor Lieutenant General Daendels, Legiun Mangkunegaran was formed based on two interests they are as reserve that is used by the dutch east Indian army and as a political tool that is used to scare-discouraging any attempt to abolish political glassware, (2) in accordance with the change of politic at 20th century, Legiun Mangkunegaran change in the terms of both quality and quantity, (3) the exiatence of Legiun Mangkunegaran makes Mangkunegaran especially and Surakarta generally having a good stability of security, (4) Legiun Mangkunegaran in 1916 -1942 can be implemented in curriculum 2013 as learning material of history to the eleventh grade of senior high school.

Kata Kunci: Legiun Mangkunegaran, Military, Learning the History

¹ Rangkuman penelitian skripsi

² Mahasiswa Program Studi Pendidikan Sejarah, FKIP UNS Surakarta

³ Dosen Pembimbing Program Studi Pendidikan Sejarah, FKIP UNS Surakarta

PENDAHULUAN

Keberadaan militer dalam struktur birokrasi, koalisi, sipil militer dalam politik dapat ditelusuri jauh ke belakang sampai pada kerajaan tradisional. Adanya ketidakstabilan dan suksesi kekuasaan melalui pemberontakan akibat konflik internal yang sering terjadi mengakibatkan kerajaan – kerajaan menempatkan militer sebagai bagian yang paling penting dalam struktur birokrasi dan pemerintahan (Purwanto, 2006). Militer merupakan landasan penting bagi raja untuk melawan ketidakaturan yang terjadi dalam wilayah kekuasaannya. Akan tetapi militer tidak menjadi penentu kebijakan, melainkan sebagai suatu lembaga dari sebuah kerajaan yang mempunyai tugas untuk mengamankan wilayah kekuasaan.

Sama halnya dengan Praja Mangkunegaran yang membutuhkan kehadiran militer sebagai sarana untuk menjaga stabilitas praja yang baru berdiri. Selain itu kehadiran militer juga digunakan sebagai unsur kemegahan dari kewibawaan praja. Legiun Mangkunegaran banyak melaksanakan tugas dalam persekutuan dengan pihak pemerintah kolonial diantaranya membantu pemerintahan Inggris dalam penyerbuan di Yogyakarta yang terjadi pada tahun 1812 dan perang Diponegoro atau yang lebih dikenal dengan sebutan perang Jawa pada tahun 1825-1830. Dengan keikutsertaan Legiun Mangkunegaran dalam perang Jawa mengakibatkan Legiun disegani oleh kerajaan- kerajaan lain khususnya di tanah Jawa.

Pada tahun 1916 sampai 1942 terjadi perubahan sosial politik di Hindia Belanda. Perubahan sosial politik menyangkut kebijakan negeri induk terhadap daerah jajahan, muncul dan berkembangnya organisasi kebangsaan, dan sikap Sunan terhadap keberadaan Mangkunegaran. Pemerintah Belanda mulai bersikap longgar terhadap daerah jajahan, hal ini dimanfaatkan Mangkunegara VII untuk melakukan pembaruan-pembaruan dalam praja dan masyarakatnya (Wasino, 2014). Dalam bidang militer Mangkunegara VII melakukan Modernisasi Legiun Mangkunegaran dan pembentukan *Reserve Korp Legioen* (Korps Cadangan Legiun) yang diambil dari para pensiunan Legiun Mangkunegaran (Santoso,

2011). Modernisasi Legiun Mangkunegaran dilakukan baik dari segi kualitatif maupun segi kuantitatif.

Materi pembelajaran di tingkat SMA kelas XI belum begitu dalam menyebutkan pengaruh kolonialisme bangsa barat khususnya Belanda di Mangkunegaran. Untuk mengembangkan pengetahuan tentang sejarah lokal yang ada disekitar peserta didik, Legiun Mangkunegaran dapat dijadikan sebagai bahan ajar dalam pengaruh kolonialisme bangsa barat khususnya Belanda di Surakarta.

METODOLOGI PENELITIAN

Tempat yang dijadikan sebagai objek penelitian adalah Mangkunegaran Alasan pemilihan objek penelitian diatas adalah tempat lahir dan berkembangnya Legiun Mangkunegaran. Untuk menunjang penelitian ini, maka peneliti juga membaca beberapa buku di berbagai perpustakaan, diantaranya : Perpustakaan Pusat UNS Surakarta, Perpustakaan Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP UNS Surakarta, Rekso Pustoko Mangkunegaran, Radya Pustaka, dan Perpustakaan Monumen Pers. Penelitian ini dilaksanakan dari bulan Februari 2014 sampai dengan Agustus 2014 yaitu terhitung sejak penyusunan judul, penyusunan proposal, mengurus perijinan sampai pengumpulan data dan penulisan akhir.

Penelitian ini menggunakan metode historis adalah kegiatan pemecahan masalah dengan cara mengumpulkan sumber – sumber sejarah yang relevan dengan permasalahan yang dikaji untuk memahami kejadian pada masa lalu kemudian menguji dan menganalisis secara kritis dan mengajukan sintesis dari hasil yang dicapai dalam bentuk tertulis dari sumber sejarah tersebut untuk dijadikan suatu cerita sejarah yang obyektif, menarik, dan dapat dipercaya. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa sumber primer dan sekunder. Metode sejarah mempunyai beberapa langkah yaitu: (1) heuristik, mencari dan mengumpulkan data, (2) menyelidiki data – data baik bentuk maupun isinya, (3) interpretasi, menetapkan makna saling berhubungan dari fakta-fakta yang diperoleh, (4) Historiografi, menyampaikan hasil yang diperoleh dalam bentuk tulisan maupun kisah.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Sejarah Berdirinya Legiun Mangkunegaran

Munculnya Legiun Mangkunegaran berawal dari perjuangan Raden Mas Said bersama para pengikutnya yang merasa kecewa terhadap pemerintahan serta ketidakadilan yang dilakukan oleh Paku Buwono II. Embrio dari Legiun Mangkunegaran adalah prajurit yang berjuang bersama Raden Mas Said. Dengan ikrar *tiji tibe* yang artinya apabila salah satu ada yang jatuh semua ikut merasakan, apabila salah satu mendapat kebahagiaan maka semua ikut menikmati, Raden Mas Said dapat menyatukan pasukannya dan memenangkan berbagai pertempuran.

Dalam perjuangannya, Raden Mas Said melakukan kerjasama dengan Sunan Kuning dan Pangeran Mangkubumi. Ketika bekerjasama dengan Sunan Kuning, Raden Mas Said dibekali dengan kepandaian mengatur strategi serta cara menggunakan senjata dan kemudian diangkat sebagai senopati yang bergelar Pangeran Prangwedana memimpin 300 orang prajurit berani mati (Sudijono, 2010). Pertempuran pertama yang dilakukan bersama Sunan Kuning adalah melawan prajurit – prajurit Kompeni dan prajurit dari Ternate dan Raden Mas Said memperoleh kemenangan. Setelah menaklukkan Madiun dan Ponorogo, Raden Mas Said berpisah dengan Sunan Kuning yang kemudian tertangkap dan di buang ke Ceylon.

Kerjasama dengan Pangeran Mangkubumi dilatarbelakangi adanya kekecewaan dari Pangeran Mangkubumi terhadap Paku Buwono II. Sebelumnya, Paku Buwono II menjanjikan hadiah tanah lungguh sebesar 3.000 cacah kepada siapa saja yang berhasil mengalahkan Raden Mas Said (Wasino, 2014). Ketika Pangeran Mangkubumi berhasil mengalahkan Raden Mas Said dan menuntut hadiah tanah lungguh yang telah dijanjikan, Paku Buwono II tidak memenuhi janjinya dan Pangeran Mangkubumi keluar dari Keraton bergabung dengan Raden Mas Said untuk melakukan perlawanan. Kerjasama dengan Pangeran Mangkubumi tidak berjalan lama, karena Pangeran Mangkubumi menghendaki perdamaian dengan Belanda. Kemudian

pada tahun 1755 terjadi perjanjian Giyanti yang membagi Mataram menjadi dua bagian.

Pemberotakan Raden Mas Said sulit dibendung, sehingga pihak Kompeni mengajukan perundingan perdamaian. Dalam pertemuan di Salatiga tanggal 17 Maret 1757, Raden Mas Said diangkat menjadi Pangeran Miji yang berkedudukan dibawah Susuhunan Surakarta, mendapat hak 4.000 karya (Pringgodigdo, 1938). Raden Mas Said dan pengikutnya kemudian membangun kadipaten Mangkunegaran yang berada di tengah kota Surakarta. Raden Mas Said mendapat gelar Pangeran Adipati Arya Mangkunegara.

Pasukan yang berjuang bersama Raden Mas Said merupakan embrio dari Legiun Mangkunegaran. Pada tahun 1808 Gubernur Jenderal Daendels tida di Jawa. Guna mempertahankan pulau Jawa, maka Daendels memanfaatkan Mangkunegaran agar dapat diandalkan untuk mempertahankan pulau Jawa. Gubernur Jenderal Daendels mengeluarkan surat keputusan pada tanggal 29 Juli 1808 yang menetapkan keberadaan Legiun Mangkunegaran. Legiun Mangkunegarandibentuk dengan dua macam kepentingan, yaitu Legiun merupakan cadangan yang berguna untuk Tentara Hindia Belanda, dan Legiun merupakan alat politik yang digunakan untuk menakut – nakuti setiap usaha meniadakan politik pecah belah (Pringgokusumo, 1989). Berkat adanya bantuan keuangan dari Pemerintah Hindia Belanda, Legiun Mangkunegaran mampu bertahan sampai pada masa kekuasaan Mangkunegara VII.

2. Perubahan dan Dinamika Legiun Mangkunegaran tahun 1916 – 1942

Berdasarkan *Reglement van het Legioen van Mangkoe Nagoro* yang ditetapkan dengan *Gouvernementsbesluit* tanggal 08 November 1928 no. 31 Mangkunegara senantiasa mengadakan pasukan bersenjata (Santoso, 2011). Biaya pemeliharaan dari Legiun ditanggung oleh Gubernur. Koprns Legiun terdiri dari Staf dan 1,5 batalyon infanteri. Staf terdiri dari kolonel, kepala Trah Mangkunegaran dengan ajudannya bepangkat Letnan, dokter militer klas 1 atau 2 dan korps musik sebesar 25 orang.

Awal abad ke – 20, Legiun Mangkunegaran telah memiliki sistem remunerasi untuk prajurit dan perwira senior. Gaji bulanan, kesehatan, dan perhatian terhadap keluarga prajurit diberikan dengan cara menyisihkan gaji untuk anak dan istri. Gaji yang diterima oleh anggota Legiun didasarkan atas pangkat dan lamanyamasa kerja yang telah ditempuh. Dalam peraturan pemberian fasilitas kesehatan menyebutkan syarat bagi anak – anak dari anggota Legiun yang masih mendapatkan fasilitas kesehatan adalah mereka yang usianya dibawah 18 tahun, belum menikah dan belum bekerja (memenuhi kebutuhannya sendiri). Sedangkan bagi anggota Legiun yang meninggalkan garnisun lebih dari 24 jam mendapat biaya tambahan sebesar f 0.37 untuk bintara, f. 0.32 untuk kopral, dan f.27 untuk para prajurit (*Verplegings regeling voor het Legioen Van Mangkoe Nagoro te Surakarta*, MN 677).

Selain mendapatkan gaji dan jaminan kesehatan, para Legiun mendapatkan uang pensiun. Uang pensiun diberikan bagi tamtama, bintara, dan perwira yang sudah berdinasi paling sedikit 20 tahun, sedangkan bagi dokter militer 15 tahun dinas. Bagi mereka yang diberhentikan dengan hormat dan memenuhi ketentuan akan mendapat besaran pensiun sebagai berikut :

Letnan Kolonel (<i>overstee</i>)	f 2.000
Mayor	f 1.600
Kapten/Dokter Militer	f 1.200
Letnan Satu/Dokter Militer Kelas Dua	f 800
Letnan Dua (<i>tweede lieutenant</i>)	f 480
Ajudan Pembantu, Perwira Kapelmeester	f 264
Sersan mayor	f 132
Sersan + Furir	f 96
Kopral	f 72
Tanpa Pangkat	f 48

Usaha yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas dari para prajurit yaitu dengan membangun lapangan tembak, *Schietterrein* (lapangan untuk belajar menembak), *Kantonnement* (tempat untuk menginap) dan tempat

untuk menyimpan barang di daerah Tawangmangu (Verslag/ laporan pembuatan Schietterrein, MN 896).

Persaingan politik antara pihak Mangkunegaran dengan Kasunanan bermula pada masa Mangkunegara I dan terus berlanjut sampai awal abad XX. Pertentangan antara Mangkunegaran dan Kasunanan telah memunculkan suatu organisasi tandingan yang digunakan untuk mencegah perluasan gerakan SI Susuhunan. Ada sekitar 123 orang Legiun masuk menjadi anggota SI dan 63 orang masuk dalam organisasi tandingannya (Larson, 1990). Hal tersebut mendorong komandan Tentara Hindia Belanda untuk menganjurkan agar Legiun dibubarkan, karena bukan nilai kemiliteran Legiun saja perlu diragukan akan tetapi disiplinnya juga telah rusak.

Konflik – konflik yang dilakukan oleh Mangkunegaran dan Kasunanan sering melibatkan penduduk pedesaan. Keterlibatan pedesaan dalam persaingan politik antar kedua trah sudah mulai terlihat pada awal abad XX dan berkembang secara terang – terangan pada tahun 1930 – an. Konflik antara Mangkunegaran dan Kasunanan yang melibatkan pedesaan adalah konflik antara *Pakempalan Kawula Surakarta* (PKS) dan *Pakempalan Kawula Mangkunegaran* (PKMN) (Wasino, 2008). Munculnya dua gerakan politik lokal tersebut merupakan akibat dari konflik yang terpendam antara pihak Mangkunegaran dan Kasunanan. PKS diidentikkan dengan pendukung Kasunanan dan PKMN sebagai tandingan dari PKS identik dengan pendukung Mangkunegaran.

Pendirian PKS merupakan ide dari Singgih dalam sebuah rapat organisasi *Persatoean Bangsa Indonesia* (PBI) cabang Surakarta. PKS didirikan dengan tujuan memperluas pengaruh PBI di kalangan rakyat kecil. Pada tahun 1930, PKS telah tersebar luas di Surakarta. Setelah sukses di wilayah Kasunanan, PKS kemudian menggeser kegiatannya di Mangkunegaran. Perkembangan organisasi tersebut ditanggapi oleh pihak Istana Mangkunegaran dengan gelisah dan kemarahan (Larson, 1990). Guna membendung laju perkembangan PKS di wilayahnya, penguasa Mangkunegaran membentuk organisasi tandingan dengan nama PKMN pada

tahun 1933. PKMN dibentuk dengan tujuan untuk memajukan kemakmuran Praja Mangkunegaran maupun kesejahteraan dan rasa setiakawan di kalangan penduduknya.

Ketegangan politik pada tingkat desa antara pendukung PKS di satu pihak dan pendukung PKMN dan aparat pemerintah Mangkunegaran dilain pihak mewarnai suasana perpolitikan desa di Mangkunegaran. Perilaku PKS sering dianggap melanggar aturan dari Pemerintah Mangkunegaran. Penolakan PKS bukan hanya dari PKMN, melainkan juga dari Legiun. Dalam perekrutan prajurit – prajuritnya, Legiun Mangkunegaran memberikan syarat bahwa para calon prajurit harus mempunyai surat tidak tersangkut politik khususny *Pakempalan Kawula Surakarta* (PKS).

Pada tahun 1942 Jepang berkuasa di Surakarta dan Legiun Mangkunegaran mengalami penurunan karena pemerintah Jepang melarang segala bentuk organisasi politik masyarakat pribumi dan berusaha melucuti semua persenjataan milik rakyat termasuk persenjataan milik pasukan Mangkunegaran. Kebijakan tersebut menyebabkan pasukan militer Mangkunegaran hanya berkedudukan sebagai abdidalem penjaga istana.

3. Dampak Legiun Mangkunegaran bagi Stabilitas Keamanan Surakarta tahun 1916 – 1942

Sejak berdirinya Kadipaten Mangkunegaran, Legiun Mangkunegaran mempunyai peranan yang sangat penting untuk menjaga keutuhan Praja Mangkunegaran. Prajurit yang terpilih menjadi Legiun, senantiasa menjaga apa yang dititahkan oleh Mangkunegara. Hal tersebut dikarenakan adanya loyalitas yang sangat tinggi antara kawula Mangkunegaran dengan Mangkunegara.

Peranan Legiun Mangkunegaran tidak hanya dalam lingkup menjaga keutuhan Kadipaten saja, akan tetapi juga patuh terhadap raja ketika Legiun diutus untuk melakukan pertempuran-pertempuran. Legiun Mangkunegaran selain digunakan untuk kekuatan Mangkunegaran dalam menghadapi musuh juga digunakan untuk membantu pemerintah kolonial dalam membrantas

beberapa pemberontakan di seluruh wilayah kekuasaan Belanda. Para legiun adalah kaula dari Kadipaten Mangkunegara, maka dari itu dalam Legiun terdapat disiplin yang sangat baik. Pelanggaran terhadap disiplin – disiplin kemiliteran jarang terjadi. Hal ini bisa terjadi karena perwira – perwira, kader dan tamtama masih saudara dekat ataupun keturunan dari pemegang Trah Mangkunegaran.

Legiun Mangkunegaran senantiasa disediakan untuk pemerintah, dan apabila di – demobilisasi sama sekali atau sebagian berada di bawah pengawasan Gubernur Surakarta, yang menjadi Kepala Intenden Legiun, dan setelah berunding dengan Panglima Tentara Hindia, dapat mengambil tindakan – tindakan seperlunya. Legiun Mangkunegaran dapat diandalkan untuk menjaga stabilitas keamanan Surakarta khususnya daerah Mangkunegaran. Pada tahun 1919 di swapraja kekurangan jumlah polisi untuk menjaga perkebunan maka didirikan regu – regu pengaman perkebunan, akan tetapi hanya di wilayah Mangkunegaran hal tersebut tidak dibutuhkan karena Mangkunegaran mempunyai Legiun. Legiun termasuk salah satu bagian tentara yang terbaik di Jawa, dan telah berjasa dalam menindas kerusuhan – kerusuhan, terutama pada waktu ada pemogokan buruh kereta api tahun 1921 dan huruhara di Surakarta tahun 1926.

4. Implementasi Legiun Mangkunegaran tahun 1916 – 1942 dalam Pembelajaran Sejarah

Mempelajari sejarah tidak ada artinya jika tidak disertai pemahaman tentang nilai yang terkandung, fungsi, dan manfaatnya. Fungsi sejarah adalah untuk meningkatkan pemahaman mendalam tentang masa lampau dan masa sekarang dalam inter relasinya dengan masa yang akan datang. Pengajaran dan pendidikan moral bangsa menuntut pengajaran sejarah berorientasi pada pendidikan kemanusiaan (*humaniora*) yang memperhatikan nilai – nilai dan norma (Gottschalk, 1975).

Dalam kurikulum 2013, pelajaran Sejarah dimasukkan dalam dua pengelompokan, yaitu mata pelajaran wajib dan mata pelajaran peminatan.

Sejarah sebagai mata pelajaran wajib berlabel Sejarah Indonesia, sedangkan dalam peminatan, sejarah dimasukkan dalam peminatan sosial dimana berada dalam satu rumpun dengan ekonomi, sosiologi dan antropologi, serta geografi yang berada dalam peminatan sosial (Fajri, 2013).

Kurikulum 2013 mulai mencantumkan sejarah lokal sebagai materi baru dalam mata pelajaran Sejarah. Materi sejarah lokal atau daerah mendapat peluang luas untuk dipelajari dalam mata pelajaran sejarah peminatan di jenjang sekolah menengah atas. Sejarah lokal dapat didefinisikan sejarah suatu tempat yang batasannya ditentukan oleh perjanjian yang diajukan penulis sejarah (Abdullah, 1990). Dimunculkannya sejarah lokal dalam kurikulum 2013 merupakan langkah yang positif dalam dunia pendidikan, karena dengan diangkatnya sejarah lokal dalam mata pelajaran sejarah dapat menambah kualitas dan pemahaman peserta didik tentang sejarah yang ada dilingkungannya. Peserta didik juga mampu mendiskripsikan konsep dan ruang lingkup sejarah lokal, serta menggali peristiwa baru dalam sejarah yang jarang dan bahkan nyaris tidak disebutkan dalam sejarah nasional.

Sejarah nasional ditentukan oleh kekuatan – kekuatan yang ekstra lokal, tidak hanya akumulasi peristiwa lokal ataupun hanya oleh kepentingan dari satu atau dua lokal yang strategis, tetapi juga oleh perimbangan – perimbangan kekuatan pada tahap nasional (Abdullah, 1978). Jika dilihat dari luarnya saja pengaruh kolonialisme Barat khususnya Belanda tidak lebih daripada pengaruh – pengaruh kolonialisme dari negara – negara lain. Akan tetapi dengan melihat kolonialisme pada tingkat lokal, seperti di Surakarta khususnya Mangkunegaran maka dapat dilihat bagaimana perbedaan pengaruh kolonialisme Barat. Dengan penelitian tingkat lokal pengaruh kolonialisme menjadi sesuatu yang aktual, bukan sesuatu yang hanya bersifat kognitif.

Pembentukan Legiun Mangkunegaran bermula dari rasa kekhawatiran VOC terhadap pemerintah Inggris atas daerah jajahan Belanda di Hindia Belanda. Oleh karena itu VOC memberi tugas kepada KGPAA Mangkunegara I (Raden Mas Said) untuk memelihara suatu pasukan yang bisa diandalkan oleh VOC sebagai tentara cadangan. Disamping itu juga berguna untuk

menambah kewibawaan pemerintahan KGPAA Mangkunegara I. Untuk itu semua pengeluaran bagi kegiatan pasukan Legiun di tanggung VOC Dalam rangka memperkuat dan mengingatkan pertahanan negara, maka dilakukan perbaikan dibidang keprajuritan. Setelah VOC dibubarkan, maka Legiun Mangkunegaran dibentuk dengan dua macam kepentingan, yaitu Legiun merupakan cadangan yang berguna untuk Tentara Hindia Belanda, Legiun merupakan alat politik yang digunakan untuk menakut-nakuti setiap usaha untuk meniadakan politik pecah belah. Untuk tujuan tersebut, maka Legiun hanya terdiri dari keluarga Mangkunegara dan kawula Mangkunegaran sehingga dapat dijamin kesetiaannya.

Seluruh biaya perawatan pasukan Legiun ditanggung oleh pemerintah Belanda karena Legiun adalah pasukan cadangan dari tentara Hindia Belanda. Pemerintah Belanda menggunakan Legiun untuk menumpas berbagai kerusuhan – kerusuhan yang terjadi di Hindia Belanda. Pada awal abad ke – 20, Hindia Belanda mengalami perubahan sosial politik dan sosial budaya, termasuk di wilayah Mangkunegaran. Perubahan sosial politik menyangkut kebijakan dari negara induk terhadap daerah jajahan, tumbuhnya organisasi kebangsaan, dan sikap Sunan terhadap keberadaan Mangkunegaran. Pemerintah Belanda mulai bersikap longgar terhadap daerah jajahan. Politik sentralisasi ketat yang dijalankan Pemerintah Hindia Belanda kini berubah menjadi desentralisasi. Mulai bermunculan pandangan – pandangan otonomi dan demokratisasi terhadap daerah jajahan. Perubahan sikap Pemerintah Belanda disebabkan karena negeri induk sedang terlibat dalam Perang Dunia I sehingga membutuhkan dukungan dari negara jajahan. Maka dari itu, modernisasi baik kualitatif maupun kuantitatif terhadap Legiun dilakukan untuk mempertahankan wilayah kekuasaan Mangkunegaran dan wilayah Hindia Belanda.

Legiun Mangkunegaran tidak dapat dikatakan sebagai pahlawan maupun pengkhianat bangsa, karena Legiun bekerja berdasarkan profesionalitasnya. Yang ditanamkan pada Legiun adalah patuh kepada

perintah pimpinan, rasa kesetiakawanan terhadap sesama anggota dan nasionalisme. Nasionalisme yang dimaksudkan adalah tanah Legiun tersebut.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam kurikulum 2013 di SMA kelas XI sejarah peminatan, Legiun Mangkuengaran diimplementasikan dalam Kompetensi Inti 3 yaitu memahami, menerapkan dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah dan Kompetensi Dasar 3.7 yaitu Menganalisis pengaruh imperialisme dan kolonialisme Barat di Indonesia dalam bidang politik, ekonomi, sosial – budaya, pendidikan dan agama serta perlawanan kerajaan Indonesia terhadap imperialisme dan kolonialisme Barat yang berfungsi untuk mengembangkan materi sejarah lokal di daerah Surakarta yang mempunyai kontribusi terhadap sejarah nasional.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan: (1) Legiun Mangkunegaran dibentuk pada tanggal 29 Juli 1808 berdasarkan surat keputusan Gubernur Jendral Daendels. Embrio dari Legiun Mangkunegaran adalah pasukan yang berjuang bersama Raden Mas Said. Legiun Mangkunegaran dibentuk dengan dua macam kepentingan yaitu Legiun Mangkunegaran sebagai cadangan yang berguna untuk Tentara Hindia Belanda dan sebagai alat politik yang digunakan untuk menakut – nakuti setiap usaha untuk meniadakan politik pecah belah, (2) Pada awal abad ke – 20, banyak perkembangan yang dialami oleh Legiun Mangkunegaran. Adanya sistem remunerasi untuk prajurit dan perwira senior, jaminan kesehatan pada anggota Legiun Mangkunegaran beserta keluarga. Dibangun lapangan untuk belajar menembak di Tawangmangu merupakan salah satu usaha untuk memajukan Legiun Mangkunegaran dari segi kualitatifnya, kemudian diadakan latihan –latihan dan penambahan personel dari segi kuantitatifnya, (3) Sebagai

satuan militer profesional, Legiun Mangkunegaran selalu menjalankan tugasnya dengan baik. Legiun Mangkunegaran dapat diandalkan untuk menjaga stabilitas keamanan Surakarta khususnya daerah Mangkunegaran, (4) Legiun Mangkunegaran tahun 1916 – 1942 dapat diimplementasikan dalam kurikulum 2013 materi pembelajaran sejarah peminatan SMA kelas XI.

SARAN

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan kesejarahan, utamanya bagi para pendidik dan pelajar. Selain itu, dalam perkembangan pendidikan sejarah sekolah menengah atas, belum banyak materi yang membahas tentang keberadaan Legiun Mangkunegaran sehingga penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu alternatif materi pelajaran yang disampaikan kepada peserta didik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, T. (1990). *Sejarah Lokal di Indonesia*. Yogyakarta: UGM Press.
- Budiardjo, M. (1986). *Aneka Pemikiran tentang Kuasa dan Wibawa*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Gottschalk, L. (1975). *Mengaerti Sejarah: Pengantar Metode Sejarah*. Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia.
- Hunington, S P. (2003). *Prajurit dan Negara: Teori dan Politik Hubungan Sipil – Militer*. Jakarta: Grasindo.
- Larson, G. D. (1990). *Masa Menjelang Revolusi Keraton dan Kehidupan Politik di Surakarta 1912 – 1914*. Yogyakarta: UGM Perss.
- Muhaimin, Y A. (2008). *Bambu Runcing dan Mesiu: Masalah Kebijakan Pembinaan Pertahanan Indonesia*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Pringgodigdo, A K. (1938). *Lahir serta Tumbuhnya Kerajaan Mangkunegaran*. Surakarta: Rekso Pustoko.
- Pringgokusumo, H. (1989). *Kedudukan Pangeran Mangkunegara dalam Struktur Politik yang Terpecah Belah di Jawa Tengah*. Surakarta: Rekso Pustoko.
- Purwanto, B. (2006). *Gagalnya Historiografi Indonesiasentris?!*. Yogyakarta: Ombak.
- Remmelink, G J Willem. (2002). *Perang Cina dan Runtuhnya Negara Jawa 1725-1743*. Yogyakarta: Penerbit Jendela.
- Santoso, I. (2011). *Legiun Mangkunegaran (1808-1942): Tentara Jawa-Perancis Warisan Napoleon Bonaparte*. Jakarta: Kompas.

Suryadinata, E & Dinuth, A. (2001). *Geopolitik dan Konsepsi Ketahanan Nasional*. Paradigma Cipta Yatsigama.

Yuniyanto, T. (2010). *Daulat Raja menuju Daulat Rakyat: Demokratisasi Pemerintahan di Yogyakarta*. Surakarta: Cakra Books.

Wasino. (2014). *Modernisasi di Jantung Budaya Jawa: Mangkunegaran 1896-1944*. Jakarta: Kompas.

Jurnal

Sudijono, S. (2010). Raden Mas Said Perjuangan serta Pemikirannya. *Patra Widya*, 11 (1), 201 – 235.

Arsip

MN 667 *Verplegingregeling voor het Legioen van Mangkoenegoro te Surakarta* (Peraturan mengenai perawatan bagi Legiun Mangkunegaran di Surakarta).

MN 896 Legiun Mangkunegaran: Laporan tentang pembuatan *Schietterrein* (lapangan untuk belajar menembak) di Tawangmangu tahun 1923.

Internet

Fajri, N. (2013). *Implementasi Kurikulum 2013 dalam Pembelajaran Sejarah*. Diperoleh 10 Juni 2014 dari <http://sejarahakademika.blogspot.com/2013/08/implementasi-kurikulum-2013-dalam/>